



Penguatan Pendidikan Demokrasi melalui Sekolah Sebagai Laboratorium Demokrasi

Strengthening Democratic Education through Schools as Laboratories of Democracy

Kwartanti Fajriatin

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Samudra, Indonesia

Penulis korespondensi: kwartantifajriatin@unsam.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 April 2026;

Revisi: 22 Mei 2026;

Diterima: 27 Juni 2026;

Terbit: 30 Juni 2026

Keywords: *Democracy Education; First-Time Voters; Leadership Integrity; Meritocracy; School as a Democracy Laboratory.*

Abstract. *Democracy education plays a crucial role in shaping citizens who are informed, responsible, and possess strong character. However, challenges such as low political participation among the youth, the proliferation of unverified information, and a weak democratic culture within schools highlight the need to continuously strengthen democracy education. This community service initiative involved academics serving as speakers at the "First-Time Voter Political School and Public Dissemination: Democracy Education, Meritocracy, and Student Leadership Integrity in Schools" event, organized by VODEM.ID on June 2, 2026, at LaCafe, Tanah Grogot, Paser Regency, East Kalimantan, and via a hybrid Zoom session. Participants included students, teachers, educational staff, election officials, and academics. The material presented focused on the concept of the school as a "laboratory of democracy," emphasizing the importance of integrating democracy education into school culture and the learning process. The event succeeded in enhancing participants' understanding of democratic values, integrity, meritocracy, and the importance of active participation in democratic life. It also yielded recommendations for strengthening democracy education in schools to foster a healthy and sustainable democratic culture.*

Abstrak

Pendidikan demokrasi merupakan bagian penting dalam pembentukan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter. Namun, berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi politik generasi muda, meningkatnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, serta lemahnya budaya demokrasi di lingkungan sekolah menunjukkan perlunya penguatan pendidikan demokrasi secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui partisipasi akademisi sebagai pembicara dalam kegiatan "Sekolah Politik Pemilih Pemula dan Diseminasi Publik: Pendidikan Demokrasi, Meritokrasi, dan Integritas Kepemimpinan Pelajar di Lingkungan Sekolah" yang diselenggarakan oleh VODEM.ID pada tanggal 2 Juni 2026 di LaCafe, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur serta secara *hybrid* melalui *Zoom Meeting*. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa, siswa, guru, tenaga kependidikan, penyelenggara pemilu, dan akademisi. Materi yang disampaikan berfokus pada konsep sekolah sebagai laboratorium demokrasi yang menekankan pentingnya integrasi pendidikan demokrasi dalam budaya sekolah dan proses pembelajaran. Hasil kegiatan menunjukkan penguatan pemahaman peserta mengenai nilai-nilai demokrasi, integritas, meritokrasi, dan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi penguatan pendidikan demokrasi di sekolah sebagai upaya membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Integritas Kepemimpinan; Meritokrasi; Pemilih Pemula; Pendidikan Demokrasi; Sekolah Sebagai Laboratorium Demokrasi.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas institusi politik, tetapi juga oleh kualitas warga negara yang memiliki

pengetahuan, keterampilan, dan karakter demokratis. Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang mampu berpikir kritis, menghargai keberagaman, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi (Culp, 2023). Oleh karena itu, pendidikan demokrasi perlu menjadi bagian integral dari proses pendidikan formal guna mempersiapkan generasi muda sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sekolah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Melalui berbagai aktivitas pembelajaran maupun interaksi sosial di lingkungan sekolah, peserta didik dapat belajar mengenai hak, kewajiban, partisipasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan demokrasi yang efektif tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik untuk mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep sekolah sebagai laboratorium demokrasi menjadi pendekatan yang relevan karena memungkinkan peserta didik belajar demokrasi melalui pengalaman langsung dalam organisasi siswa, musyawarah, pengambilan keputusan, serta berbagai aktivitas partisipatif lainnya (Afriliah, Sumadi & Nadiroh, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital membawa tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan demokrasi. Generasi muda saat ini hidup dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh media digital dan media sosial. Di satu sisi, teknologi digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan demokrasi. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai persoalan seperti penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, dan polarisasi politik. Kondisi ini menuntut adanya penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mampu membekali peserta didik dengan literasi digital, literasi politik, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik digital (Hermawan, Darmawan & Bestari, 2024).

Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter kewargaan (*civic disposition*). Melalui pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis pengalaman, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menyelesaikan konflik secara damai, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pendidikan demokrasi yang terintegrasi dalam budaya sekolah berkontribusi terhadap terbentuknya warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi (Mulyani, Komalasari, Permatasari, Bribin, &

Suriaman, 2024).

Selain pendidikan demokrasi, penguatan nilai meritokrasi dan integritas juga menjadi kebutuhan penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Meritokrasi menekankan pentingnya penghargaan terhadap kompetensi, prestasi, dan kapasitas individu sebagai dasar dalam memperoleh posisi kepemimpinan. Nilai ini perlu ditanamkan sejak dini agar peserta didik memahami pentingnya kerja keras, tanggung jawab, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Sementara itu, integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepemimpinan yang jujur, transparan, dan akuntabel. Penguatan kedua nilai tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pembelajaran maupun aktivitas organisasi di lingkungan sekolah (Rohmatin, Taufiq, Nurmadina, Rizqullah & Hasibuan, 2024).

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Generasi muda memiliki jumlah yang signifikan dalam struktur pemilih nasional sehingga berpotensi menentukan arah perkembangan demokrasi di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan politik dan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula perlu dilakukan secara sistematis melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk sekolah, perguruan tinggi, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran politik, partisipasi demokratis, serta kemampuan generasi muda dalam mengambil keputusan politik yang rasional dan bertanggung jawab (Devi, Abdulkarim, & Asep, 2026).

Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, akademisi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penguatan pendidikan demokrasi di masyarakat melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah keterlibatan akademisi sebagai narasumber dalam kegiatan diskusi publik dan diseminasi pendidikan demokrasi. Kegiatan ini menjadi sarana transfer pengetahuan, penguatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, VODEM.ID menyelenggarakan kegiatan “Sekolah Politik Pemilih Pemula dan Diseminasi Publik: Pendidikan Demokrasi, Meritokrasi, dan Integritas Kepemimpinan Pelajar di Lingkungan Sekolah” pada tanggal 2 Juni 2026 di LaCafe, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan hybrid melalui Zoom Meeting dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, akademisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Samudra, serta akademisi Universitas Mulawarman. Dalam kegiatan tersebut, penulis berperan sebagai narasumber dengan tema “Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi” yang berfokus

pada penguatan pendidikan demokrasi, integritas, meritokrasi, dan karakter kewargaan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya demokrasi serta mendorong terciptanya budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui metode partisipatif dalam bentuk diskusi publik dan diseminasi hasil *forum group discussion* (FGD).



Gambar 1. Flyer Kegiatan.

Waktu dan Tempat

- Hari/Tanggal: Selasa, 2 Juni 2026
- Waktu: 16.00 WITA–Selesai
- Tempat: LaCafe, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan *Zoom Meeting*

Mitra Kegiatan

- Digital Democracy Initiative
- VODEM.ID
- Tumbuk Movement
- CIVICUS
- TIFA
- Institut Hijau Indonesia
- CIVIC EDUCATION
- FIM SAMARINDA

i. Akar Kuning Samarinda

Peserta

- a. Siswa
- b. Guru
- c. Tenaga Kependidikan
- d. Mahasiswa
- e. Organisasi Kepemudaan

Tahapan Pelaksanaan

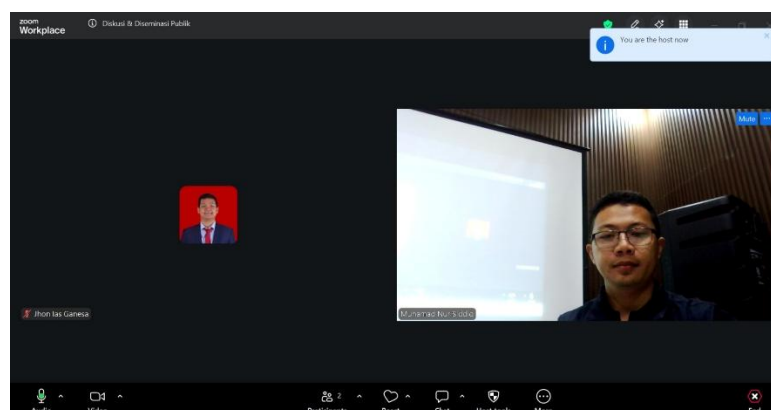
- a. Persiapan kegiatan dan koordinasi dengan penyelenggara.
- b. Diseminasi hasil FGD mengenai demokrasi pelajar.
- c. Penyampaian materi oleh narasumber.
- d. Diskusi interaktif dan tanya jawab.
- e. Penyusunan rekomendasi penguatan pendidikan demokrasi di sekolah.

Materi yang disampaikan oleh penulis sebagai akademisi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengangkat tema “Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi” yang mencakup:

- a. Peran pendidikan dalam membentuk warga negara yang kritis, demokratis, dan berkarakter.
- b. Integrasi pendidikan demokrasi dalam budaya sekolah dan pembelajaran.
- c. Penguatan karakter kewargaan, integritas, dan meritokrasi melalui pengalaman belajar autentik.
- d. Keterlibatan sekolah dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2. Penyampaian diseminasi hasil FGD terkait refleksi demokrasi pelajar oleh

fasilitator.

Kegiatan berlangsung secara *hybrid* dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Acara diawali dengan registrasi peserta, pembukaan, dan diseminasi hasil FGD terkait refleksi demokrasi pelajar. Selanjutnya dilakukan diskusi publik dengan menghadirkan tiga narasumber yang membahas pendidikan demokrasi dari perspektif pemilihan, politik, dan akademik.



Gambar 3. Penyampaian materi dari KPU Kabupaten Paser dan Dosen Universitas Mulawarman.

Pada sesi akademik, pemateri menekankan bahwa sekolah harus menjadi ruang belajar demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan pengalaman demokratis peserta didik. Sekolah perlu menciptakan budaya yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta menghargai keberagaman.

4. DISKUSI



Gambar 4. Penyampaian materi dari Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Samudra.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengangkat tema “Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi” bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru, tenaga

kependidikan, dan peserta didik mengenai pentingnya sekolah sebagai ruang pembelajaran demokrasi yang nyata. Materi yang disampaikan menekankan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai konsep politik, tetapi juga sebagai praktik kehidupan sehari-hari yang perlu dibiasakan melalui budaya sekolah, proses pembelajaran, serta interaksi sosial antarwarga sekolah. Pandangan ini sejalan dengan penelitian Ramadhona (2023) yang menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membangun budaya demokrasi melalui pengalaman belajar yang kontekstual dan partisipatif.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya penguatan pemahaman peserta mengenai peran strategis pendidikan dalam membentuk warga negara yang kritis, demokratis, dan berkarakter. Pada sesi diskusi, peserta mengungkapkan bahwa selama ini pendidikan demokrasi masih sering dipahami sebatas materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Setelah mengikuti kegiatan, peserta memperoleh perspektif baru bahwa nilai-nilai demokrasi dapat diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas sekolah, seperti musyawarah kelas, pemilihan pengurus organisasi siswa, penyusunan tata tertib secara partisipatif, serta keterlibatan peserta didik dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryadi & Budimansyah (2021) yang menyatakan bahwa pembelajaran demokrasi akan lebih efektif apabila diimplementasikan melalui budaya sekolah dan praktik kehidupan sehari-hari peserta didik.

Temuan tersebut juga sejalan dengan pandangan bahwa sekolah merupakan lingkungan sosial yang berfungsi sebagai wahana pembelajaran kewarganegaraan demokratis. Pendidikan demokrasi yang efektif tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (*civic knowledge*), tetapi juga pada pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) melalui pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupan sekolah (Reichert & Print, 2021). Dengan demikian, sekolah berperan sebagai miniatur kehidupan demokrasi yang memungkinkan peserta didik belajar mengenai hak, kewajiban, partisipasi, toleransi, dan tanggung jawab sosial secara langsung. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Winataputra (2022) yang menegaskan bahwa sekolah demokratis merupakan sarana strategis dalam penguatan kompetensi kewarganegaraan abad ke-21.

Selain itu, hasil pengabdian menunjukkan bahwa para peserta memiliki kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya integrasi pendidikan demokrasi dalam budaya sekolah dan proses pembelajaran. Guru dapat menyadari bahwa pembelajaran demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PPKn, melainkan perlu diterapkan dalam seluruh mata pelajaran melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan berpusat pada peserta didik. Dalam diskusi kelompok, peserta menyampaikan bahwa praktik pembelajaran yang

memberikan ruang bagi peserta didik untuk bertanya, berargumentasi, menyampaikan pendapat, dan melakukan refleksi kritis dapat menjadi sarana efektif dalam menumbuhkan budaya demokrasi. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wahab & Sapriya (2023) yang menunjukkan bahwa pembelajaran partisipatif berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan demokratis peserta didik.

Temuan ini relevan dengan teori konstruktivisme sosial yang menempatkan interaksi sosial sebagai unsur penting dalam pembentukan pengetahuan dan nilai. Melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran, peserta didik memperoleh pengalaman demokratis yang berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan. Penelitian yang dilakukan oleh Knowles & Castro (2022) menunjukkan bahwa lingkungan belajar yang demokratis mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, toleransi, dan partisipasi siswa dalam kehidupan sosial maupun politik.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam kegiatan pengabdian adalah penguatan karakter kewargaan, integritas, dan meritokrasi melalui pengalaman belajar autentik. Berdasarkan hasil diskusi, peserta memahami bahwa karakter demokratis tidak dapat dibentuk hanya melalui ceramah atau penyampaian materi, tetapi harus dibangun melalui praktik nyata yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami proses demokrasi secara langsung. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas secara terbuka, kegiatan organisasi siswa seperti OSIS, ketua ekstrakurikuler, proyek kolaboratif, serta forum musyawarah yang melibatkan peserta didik dalam penyelesaian masalah sekolah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *experiential learning* yang menekankan pentingnya pengalaman langsung sebagai sarana pembentukan nilai dan karakter. Menurut Sant, Devies, Pashby, & Shultsz (2023), pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pengalaman mampu meningkatkan kesadaran demokratis peserta didik karena mereka tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mengalami proses demokrasi dalam kehidupan nyata. Melalui pengalaman tersebut, peserta didik belajar mengenai kejujuran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap perbedaan.

Dalam konteks meritokrasi, peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya penghargaan terhadap prestasi, kompetensi, dan usaha sebagai bagian dari budaya demokrasi yang sehat. Sekolah yang menerapkan prinsip meritokrasi memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta didik untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan dalam lingkungan sekolah.



Gambar 5. Peserta memberikan tanggapan.

Lebih lanjut, hasil pengabdian memperlihatkan adanya perubahan perspektif peserta mengenai peran sekolah dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta memandang demokrasi sebagai isu yang lebih banyak berkaitan dengan dunia politik. Namun setelah mengikuti kegiatan, peserta memahami bahwa budaya demokrasi dapat dibangun melalui kebiasaan sehari-hari yang mencerminkan penghormatan terhadap hak orang lain, keterbukaan, partisipasi, musyawarah, dan tanggung jawab bersama.

Perubahan perspektif tersebut menunjukkan adanya proses transformasi sosial pada tingkat pemahaman dan kesadaran warga sekolah. Secara teoritis, proses ini dapat dijelaskan melalui pendekatan pendidikan transformasional yang menekankan perubahan cara pandang individu terhadap realitas sosial melalui pengalaman belajar reflektif. Menurut Biesta (2022), pendidikan demokrasi yang efektif harus mampu mendorong peserta didik dan komunitas sekolah untuk menjadi subjek yang aktif dalam kehidupan demokratis, bukan sekadar objek yang menerima informasi tentang demokrasi.



Gambar 6. Foto Bersama.

Berdasarkan keseluruhan hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa konsep sekolah sebagai laboratorium demokrasi memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung penguatan pendidikan karakter dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia. Sekolah

tidak hanya berfungsi sebagai lembaga transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kompetensi demokratis melalui pengalaman langsung. Temuan pengabdian menunjukkan bahwa penguatan budaya demokrasi di sekolah dapat dilakukan melalui integrasi nilai demokrasi dalam pembelajaran, pengembangan budaya sekolah yang partisipatif, penerapan prinsip meritokrasi, serta pemberian ruang keterlibatan aktif bagi peserta didik dalam berbagai aktivitas sekolah. Dengan demikian, sekolah berpotensi menjadi agen perubahan sosial yang berkontribusi dalam membentuk generasi muda yang demokratis, berintegritas, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

5. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui partisipasi sebagai pembicara dalam Diskusi dan Diseminasi Publik Pendidikan Demokrasi, Meritokrasi, dan Integritas Kepemimpinan Pelajar memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai demokrasi, meritokrasi, dan integritas. Konsep sekolah sebagai laboratorium demokrasi menjadi pendekatan yang relevan untuk membangun karakter kewargaan peserta didik melalui pengalaman belajar yang autentik dan partisipatif. Kolaborasi antara akademisi, penyelenggara pemilu, sekolah, dan masyarakat perlu terus diperkuat guna menciptakan budaya demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara kegiatan Diskusi dan Diseminasi Publik Pendidikan Demokrasi, Meritokrasi, dan Integritas Kepemimpinan Pelajar di Lingkungan Sekolah, khususnya kepada Digital Democracy Initiative (DDI), VODEM.ID, Tumbuk Movement, serta seluruh mitra penyelenggara dan media partner yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan ini.

Penghargaan dan apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelajar, yang telah mengikuti kegiatan dengan antusias dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Interaksi dan pertukaran gagasan yang terjadi selama kegiatan berlangsung menjadi kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman tentang pendidikan demokrasi, meritokrasi, dan integritas kepemimpinan di lingkungan pendidikan.

Semoga kolaborasi yang telah terjalin antara akademisi, penyelenggara, dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus berlanjut dalam upaya memperkuat budaya demokrasi, meningkatkan kualitas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta membangun generasi muda yang berintegritas, kritis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

DAFTAR REFERENSI

- Afrilihadi, A. R., Sumadi, T., & Nadiroh. (2025). Schools as citizenship laboratories in the digital era: A literature review. *Journal of Moral and Civic Education*, 9(1), 48–59. <https://doi.org/10.24036/8851412912025867>
- Banks, J. A. (2020). *Diversity, transformative knowledge, and civic education: Selected essays* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003018360>
- Banks, J. A. (2022). Failed citizenship and transformative civic education. In *The challenge of radicalization and extremism: Integrating research on education and citizenship in the context of migration* (Vol. 19). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004528703_003
- Biesta, G. (2022). *World-centred education: A view for the present*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003098339>
- Culp, J. (2023). Democratic citizenship education in digitized societies: A Habermasian approach. *Educational Theory*, 73(2), 178–203. <https://doi.org/10.1111/edth.12573>
- Devi, M. Y., Abdulkarim, A., & Asep. (2026). The disruption and transformation of social studies education in Indonesia: Challenges, opportunities, and adaptive strategies in the digital era. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 15(2). <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v15i2.7793>
- Hermawan, D., Darmawan, C., & Bestari, P. (2024). Transforming citizenship education in the digital era: Challenges and opportunities for the Indonesian millennial generation. *Unnes Political Science Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.15294/upsj.v8i1.9256>
- Isin, E. F., & Ruppert, E. (2020). *Being digital citizens* (2nd ed.). Rowman & Littlefield. <https://doi.org/10.4324/9781003100102>
- Knowles, R. T., & Castro, A. J. (2022). The implications of ideology for civic education. *Theory & Research in Social Education*, 50(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/00933104.2021.2010870>
- Mulyani, H., Komalasari, K., Permatasari, M., Bribin, M. L., & Suriaman. (2024). Transformasi pendidikan kewarganegaraan global di era abad ke-21: Analisis implementasi dan tantangan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 21(1). <https://doi.org/10.24114/jk.v21i1.55115>
- Ramadhona, A. (2023). Citizenship education (civic education) in the era of democratization. *Academy of Education Journal*, 14(2), 749–756. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1899>
- Reichert, F., & Print, M. (2021). Civic participation of high school students: The effect of civic learning in school. *Educational Review*, 73(2), 201–220. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1671463>
- Rohmatin, Z., Taufiq, A. M., Nurmadina, N. A., Rizqullah, R., & Hasibuan, H. A. (2024). Pentingnya pendidikan demokrasi di Indonesia dalam menghadapi era digital.

SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, 2(4).
<https://doi.org/10.62383/sosial.v2i4.454>

- Sant, E., Davies, I., Pashby, K., & Shultz, L. (2023). *The Palgrave handbook of global citizenship and education*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-18112-4>
- Suryadi, K., & Budimansyah, D. (2021). School culture and democratic citizenship education in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 157–168. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41255>
- Veugelers, W. (2023). Education for democratic intercultural citizenship. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 392. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-01938-7>
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2023). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Winataputra, U. S. (2022). Reinventing civic and citizenship education for strengthening democratic citizenship in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.48233>
- Zembylas, M. (2023). Critical democratic citizenship education and affective pedagogies in schools. *Journal of Social Science Education*, 22(1), 1–15. <https://doi.org/10.11576/jsse-5885>
- Zhao, Y., & Watterston, J. (2021). The changes we need: Education post COVID-19. *Journal of Educational Change*, 22(1), 3–12. <https://doi.org/10.1007/s10833-021-09417-3>